

OJK Keluarkan 5 Peraturan Tindak Lanjuti Perppu No 1/2020

OJK keluarkan lima POJK untuk tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

OJK pada April lalu mengeluarkan lima Peraturan OJK (POJK) sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. POJK ini untuk mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong roda perekonomian nasional agar tetap bergerak.

POJK Covid-19 IKNB ini antara lain memuat ketentuan mengenai pemberian restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 dan berbagai ketentuan lain seperti batas waktu penyampaian laporan berkala; pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan; perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.



POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tersebut juga mengatur perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti serta pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti.



POJK kedua ialah POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) terbuka. POJK ini dikeluarkan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka, khusus kehadiran.



Ketiga, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (e-RUPS). POJK ini mengatur proses pengambilan keputusan bisnis korporasi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.



Kegiatan Usaha Utama.

Keempat yakni, POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. POJK ini dikeluarkan untuk mendukung amanat dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Perppu No. 1 Tahun 2020 dan merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan



Terakhir POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. POJK ini mengamanatkan OJK untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di sektor perbankan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemik virus Covid-19.



Kopi dengan Cita Rasa Lokal Incaran Investor Asing

Kedai kopi mengisi ceruk pasar antara kopi mahal dari ritel kopi internasional dengan kedai kopi tradisional. Berawal dari modal patungan, kini Kopi Kenangan meraup investasi hingga miliaran rupiah dengan valuasi lebih dari USD 100 juta.

Pada awalnya, 2017, tiga sekawan Edward Tirtanata, James Pranoto, dan Christian Sutardi, merintis bisnis ritel minuman kopi untuk mengangkat citra kopi lokal di mata masyarakat. Maklum, sebelumnya berbicara kedai kopi identik dengan ritel kopi asing yang bercokol di mal, gedung perkantoran, dan pojokan jalan strategis, sementara kedai kopi lokal tinggal kenangan.

Nama KK itulah yang kemudian mereka usung untuk membangun rasa penasaran calon konsumen.

Penamaan menu-menunya juga dibuat selaras dengan nama kedai, seperti KK Mantan, KK Masa Lalu, dan sebagainya, sehingga membuat banyak orang merasa terwakili dan terhubung.

Dalam waktu singkat kedai kopi ini menjadi viral, sehingga banyak orang tergoda untuk mencobanya. Harga yang terjangkau dan cita rasa yang tak kalah dengan kopi ritel internasional membuat KK kian populer, terutama di kalangan milenial.

Sambutan pasar yang meriah membuat dalam tiga bulan KK mampu membangun kedai lagi. "Hasil keuntungan yang didapat, kami investasikan kembali untuk membangun kedai baru," jelas Edward Tirtanata, CEO dan Co-Founder KK. Di tahun kedua beroperasi KK sudah membangun lebih dari 60 kedai.

Pertumbuhan pesat ini menarik perhatian perusahaan modal Ventura, Alpha JWC, yang kemudian menginvestasikan dana USD 8 juta pada Oktober 2018. Berkat suntikan dana ini KK bisa tancap gas mencapai pertumbuhan yang tinggi di setiap tahunnya, dengan margin yang menggiurkan.

Keberhasilan ini mendorong Edward terus berinovasi, meluncurkan aplikasi KK yang bisa diunduh melalui *Play Store* atau *App Store (IOS)*. Melalui aplikasi ini konsumen bukan sekadar dapat memesan kopi lebih



Tidak hanya itu, ke depannya KK ingin membuka kedai di Thailand, Filipina, dan Malaysia. "Kami ingin KK bisa membawa perusahaan F&B Indonesia ke pentas global," ujarnya.

RAHASIA KK RAIH INVESTOR

- **Melek Teknologi.** KK melakukan efisiensi dengan mengadopsi berbagai teknologi di jaringan kedainya. Kualitas produk terjaga namun tetap efisien berkat otomatisasi, *inventory management*, dan *demand balancing*.
- **Pelayanan Terbaik untuk Konsumen.** Berkat aplikasi pelanggan dapat memesan lebih dulu (*pre-order*) sebelum tiba di kedai. Di tengah dinamika kesibukan, pelanggan tidak perlu buang waktu dalam antrean panjang.
- **Kerjasama dengan Start-up Lain.** KK memanfaatkan layanan *on-demand* ojek *online* sehingga konsumen semakin mudah menjangkau produk KK. Setengah dari penjualannya berasal dari layanan pemesanan lewat ojek *online*.

dulu (*pre-order*), melainkan 'meracik' kopi secara *customized* dengan menentukan komposisi susu dan kopi yang diinginkan. "Konsumen bisa menyesuaikan selera kopinya dan mengatur kapan kopi akan diambil," tutur Edward. Pembayaran bisa dilakukan dengan uang virtual lewat aplikasi. Begitu sampai kedai kopi, konsumen tinggal menyerahkan *QR code*. Berkat aplikasi ini konsumen tak perlu antre, sehingga semakin nyaman.

Pada 2019 KK kembali mendapat suntikan dana Rp 280 miliar dari Sequoia Capital India yang juga dibantu beberapa nama besar seperti petenis Serena Williams melalui Serena Ventures dan Arrive, anak usaha Roc Nation yang didirikan *rapper* Jay-Z. Pemain basket NBA Caris LeVert juga masuk sebagai investor baru di *start-up* F&B ini.

KK pun tumbuh kian meroket. Pada 2020, kedai ini menjadi ritel minuman dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Hal ini membuat kepercayaan investor kian bertambah. Di tengah lesunya bisnis di masa pandemi Covid-19, KK justru mendapatkan guyuran dana sebesar USD 109 juta (setara Rp 1,635 triliun), dari Seri B yang dipimpin

Sequoia Capital. Investor baru kali ini termasuk B Capital, Horizons Ventures, Verlinvest, Kunlun, Sofina, serta investor pendanaan awal KK, Alpha JWC.

Dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk memperkuat operasinya di Indonesia, meluncurkan produk baru, berinvestasi dalam teknologi agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik, serta upaya untuk melindungi karyawan di tengah pandemi Covid-19.

Edward mengakui pandemi Covid-19 membuat penjualan KK sempat turun 40% pada 2 bulan pertama. Tapi dengan jeli Edward mengubah strategi, mereka tidak membuka kedai baru di area mal atau perkantoran yang menjadi sepi karena pembatasan fisik dan sosial. "Kami fokus membidik area perumahan," ungkapnya. Hasilnya, penjualan kembali terkerek naik hingga 50% yang didominasi pesan antar di perumahan-perumahan.

Dengan strategi tersebut Edward berharap KK berhasil mencapai target pasar 2020, yakni membuka sedikitnya 180 kedai baru dan membuat KK menjadi perusahaan kedai kopi terbesar di Indonesia dengan 500 kedai kopi di Indonesia.

Satgas Waspada Investasi Terus Perkuat Koordinasi dengan POLRI



Maraknya investasi ilegal dan *fintech* ilegal yang tidak memiliki izin OJK membuat perlindungan kepada masyarakat susah dilakukan. Untuk meminimalkan korban, OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) terus mencegah tindakan melawan hukum bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Untuk itu, SWI terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan *fintech* ilegal yang ditemukan SWI.

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI. Semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera ditindak

sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan *fintech* ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing.

Semua temuan SWI ini dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri dengan memberikan surat laporan informasi untuk dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana. Hal ini dilakukan, dengan harapan dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Tongam menjelaskan, pinjaman *fintech* ilegal sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga dan denda yang tinggi, jangka

waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak telepon genggam nasabah. *Fintech* ilegal ini sangat berbahaya, karena data nasabah yang diakses tersebut dapat disebar dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Sebagai informasi, Kapolri sudah menjalin kerja sama dengan SWI dalam menindak kegiatan ilegal seputar investasi. Dalam penindakannya pada Juni 2020, SWI berhasil menemukan 105 *fintech peer to peer lending* ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam. 105 *fintech peer to peer lending* ilegal itu tidak



Masyarakat Harus Melek Informasi

Menjamurnya investasi ilegal disebabkan banyaknya permintaan masyarakat akan jasa keuangan serta rendahnya pengetahuan masyarakat akan investasi ilegal, penawaran bunga tinggi, dan penggunaan tokoh agama, tokoh masyarakat serta selebriti sebagai pendukung propaganda agar masyarakat bergabung dalam investasi tersebut.

Satgas Waspada Investasi (SWI) mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
- Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
- Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada sikapiuangmu.ojk.go.id.

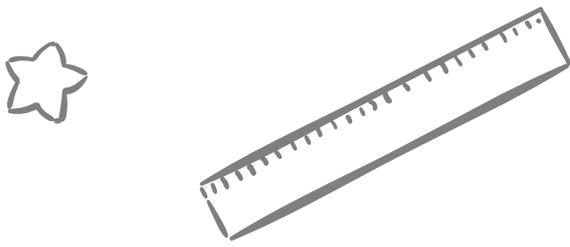
Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

terdaftar dan tidak berizin dari OJK. *Fintech peer to peer lending* ilegal itu semakin marak dengan memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Selain *fintech* ilegal SWI juga menghentikan 99 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat. "Penawaran usaha ilegal ini sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat. Mereka memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan mengiming-imingi pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi situs lembaga

yang memiliki izin sehingga seolah-olah situs tersebut resmi milik lembaga yang memiliki izin," papar Tongam.

Dari 99 usaha yang dihentikan kegiatannya tersebut 87 di antaranya melakukan perdagangan berjangka/*forex* ilegal, dua penjualan langsung (*direct selling*) ilegal, tiga investasi *cryptocurrency* ilegal, tiga investasi uang, dan empat lainnya seperti pendidikan dan pelatihan bisnis, konsultan bisnis, investasi uang tanpa izin, perdagangan daring menggunakan skema multi level marketing (MLM) atau *money game*, hingga jasa pelunasan utang tanpa izin.



Rumah Privat

Menggali Peluang di Tengah Pandemi



Siapa bilang bencana Covid-19 membuat mati kutu? Jika kreatif memanfaatkan kemampuan dan keterampilan, di masa krisis ini Anda tetap dapat mengisi pundi-pundi uang Anda, seperti yang dilakukan Rumah Privat.

Wabah Covid-19 sudah banyak memakan korban. Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicanangkan pada akhir Maret lalu hingga di masa transisi menuju Kenormalan Baru kini, kebanyakan sekolah dan bimbingan belajar (bimbel) masih belum bisa beroperasi kembali. Guru-guru mati kutu, kata orang.

Tapi tunggu dulu. Di tengah kesulitan, selalu ada jalan. Begitu kata pepatah. Dalam situasi apa pun banyak siswa yang membutuhkan belajar tambahan. Jika siswa tak mungkin datang ke sekolah atau bimbel, mengapa tidak gurunya saja yang datang ke rumah? Tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga aman bagi kedua

pihak. Inilah yang dilakukan Rumah Privat sejak awal 2020.

Bimbel yang satu ini memang mengkhususkan diri memberikan bimbingan belajar dengan guru privat yang datang ke rumah. Materinya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga siswa dapat menambah kemampuan pada materi-materi tertentu yang belum dikuasai saja. Selain memberikan program pengajaran untuk siswa/i dari tingkat PAUD hingga SMA, Rumah Privat juga memberikan bimbel privat mengaji, bahasa asing, komputer, menggambar, persiapan menghadapi Ujian Nasional, dan sebagainya.

Meski berkantor pusat di Bintaro, Jakarta Selatan, saat ini Rumah Privat melayani bimbel ke rumah di kawasan



Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dengan 1.238 tutor yang berdomisili di Jabodetabek, persoalan lokasi siswa tidak menjadi masalah. Tenaga pengajarnya rata-rata adalah lulusan S1 dan S2 serta mahasiswa tingkat akhir yang berpengalaman di bidangnya.

Biaya yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan lama belajar, di kisaran Rp110-Rp180 ribu per sesi selama 60-90 menit untuk siswa PAUD hingga SMA. Untuk orang dewasa, Rumah Privat memberikan bimbingan mengaji, menggambar, bahasa asing, dan komputer dengan harga berkisar Rp130.000 hingga Rp200.000 per sesi selama 60-90 menit.

Hingga Agustus 2020 jumlah peminat jasa Rumah Privat telah mencapai 2.569 siswa/i. Untuk mereka yang kreatif, selalu ada peluang dalam situasi apa pun.



Pilah Pilih Asuransi yang Tepat di Tengah Pandemi

Sebelum pandemi menerpa, asuransi acapkali dianggap tidak penting. Namun kini, ia diburu sebagai bentuk proteksi diri dari kerugian finansial akibat wabah penyakit. Lalu, bagaimana kiat memilih asuransi yang tepat agar tidak terjebak perusahaan asuransi bodong?

Asuransi saat ini masih menjadi hal yang belum banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masih rendahnya persentase masyarakat Indonesia yang telah memiliki asuransi. Dosen Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Kapler A. Marpaung mengatakan jumlah pemegang polis di Indonesia baru sekitar 20% dari jumlah penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola pikir berasuransi dan penetrasi asuransi masih rendah. Masyarakat di Indonesia masih menganggap asuransi bukan sebuah kebutuhan yang mendesak sehingga menjadi pilihan kesekian dalam urutan kebutuhan mereka.

Namun, keadaan mulai berubah ketika Indonesia dihantam pandemi Corona. Permintaan asuransi seperti asuransi kesehatan dan jiwa mulai meningkat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya proteksi dari segala macam kerugian finansial jika terjadi musibah termasuk wabah penyakit.

Menurut data OJK, secara *month to month (mtom)* jumlah premi asuransi masih naik. "Data premi asuransi jiwa naik 20,42% dari Rp64,01 triliun menjadi Rp77,08 triliun," ujar Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers virtual, Selasa (4/8/2020). Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) juga menyatakan hal yang sama. Pendapatan premi dari lini bisnis asuransi kesehatan mencapai Rp2,61 triliun hingga Maret 2020. Nilai ini tumbuh 8,9% *year on year (yoy)* dari posisi Rp2,4 triliun pada kuartal 1-2019.

Meski di tengah pandemi saat ini dua jenis asuransi tersebut amat penting, namun bukan berarti Anda bisa asal pilih produk asuransi dengan promo-promo yang menarik. Sebaliknya, Anda harus sangat jeli memilih produk asuransi sesuai kebutuhan dari perusahaan asuransi yang betul-betul terpercaya dan sehat. Perhatikan poin-poin penting memilih asuransi yang tepat berikut ini, berdasarkan rangkuman data OJK dalam rangka mengedukasi masyarakat meningkatkan pemahaman tentang Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa yang ditawarkan.

Tips Memilih Asuransi

1. Ketika membeli asuransi, carilah penawaran minimal dari tiga perusahaan agar Anda dapat memilih asuransi dengan *benefit* yang sama, tapi dengan nilai premi yang paling murah. Murah atau mahal nya premi asuransi yang harus dibayarkan tidak mencerminkan kualitas perusahaan asuransi.
2. Pilihlah produk asuransi sesuai kebutuhan Anda dan kenali dengan detail jenis asuransinya. Agen mungkin akan menawarkan lebih dari satu jenis, karenanya Anda harus cermat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.
3. Pastikan agen asuransi yang membantu mengurus pembelian produk asuransi adalah agen yang profesional, memiliki sertifikasi keagenan, dan mampu membantu dan menjelaskan secara detil dalam mengurus keperluan asuransi Anda kemudian hari.
4. Pastikan perusahaan asuransi yang Anda dipilih telah terdaftar di OJK dan Asosiasi. Anda dapat mengeceknya melalui laman OJK dan Asosiasi atau tanyakan langsung ke Kontak OJK 157 atau pada nomor whatsapp 081157157157
5. Pastikan perusahaan asuransi yang Anda pilih memiliki penjamin (*underwriter*) yang berpengalaman dan ahli, yang dapat dilihat dari profil perusahaannya. Regulasi OJK mensyaratkan perusahaan asuransi wajib memiliki tenaga ahli di kantor pusat, ajun ahli di seluruh kantor cabang, dan juga tenaga aktuaris.
6. Pilihlah perusahaan asuransi yang resmi terdaftar di OJK dan bereputasi baik. Pertimbangkan perusahaan asuransi yang memiliki *Risk Based Capital (RBC)* di atas 120%. Hal ini mencerminkan kondisi finansial perusahaan asuransi tersebut sehat, sehingga Anda dapat mengetahui apakah perusahaan asuransi tersebut dapat memenuhi janji pembayaran atau tidak ketika Anda mengajukan klaim.

Bambang Brodjonegoro

Penggagas *Tax Amnesty* 2016 & Realisator KNKS

Bambang Brodjonegoro, sosok inspiratif yang merupakan salah satu ekonom ternama Indonesia. Beliau merupakan sosok dibalik kebijakan *Tax Amnesty* dan terealisasinya pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).



Memiliki segudang pengalaman di bidang akademik, Bambang Brodjonegoro sempat menduduki jabatan strategis di lembaga internasional yakni Islamic Development Bank. Dia menjabat Direktur Jenderal Islamic Research and Training Institute (IRTI) di IDB pada 2009 hingga 2011. Sejak saat itu pula,

Bambang kerap menjadi tokoh penting dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Dirinya dilantik menjadi Menteri Keuangan di pemerintahan Joko Widodo, menggantikan Chatib Basri. Bambang dihadapkan pada kondisi perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas pada sektor energi. Semasa menjabat, Bambang mencetuskan berbagai kebijakan dan program kerja. Salah satunya adalah pemotongan subsidi BBM. Namun rasio utang terhadap *Gross Domestic Bruto* (GDP) Indonesia menurun. Gebrakan ini menambah ketersediaan dana tunai yang diarahkan untuk belanja infrastruktur.

Berkat kebijakan dan hasil kerjanya, Bambang Brodjonegoro dianugerahi oleh FinanceAsia sebagai salah satu Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia selama dua tahun berturut-turut di tahun 2015 dan 2016. FinanceAsia sendiri adalah salah satu publikasi terdepan di Asia yang fokus mengkaji keuangan dan pasar kapital. Ia menempati posisi ke-2 dan ke-4 untuk kedua tahun tersebut.

Satu programnya yang sangat populer dan mendobrak status quo di masyarakat adalah program *tax amnesty* yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Walaupun Bambang dan tim yang menyusun serta merumuskan pemikiran soal program ini, tapi nyatanya Bambang tidak sampai waktu untuk menjalankan implementasinya.

"Indonesia butuh *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* bukan hal tabu, karena negara lain juga banyak yang sudah menerapkan bahkan *tax ration*nya lebih tinggi. *Tax ratio* Indonesia masih kecil karena pajak aktifnya masih terbatas, dan yang sudah bayar, *income* yang dinyatakan tidak seperti yang seharusnya. Maka dari itu, *Tax Amnesty* itu penting dan merupakan pemberian pengampunan kepada orang yang belum bayar pajak sama sekali dan belum bayar pajak dengan benar," terang Bambang yang kini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Bambang juga me-review *Tax Amnesty* yang kini telah berakhir. "Secara koleksi *Tax Amnesty* sudah baik,

namun repatriasi masih belum terlalu memuaskan. *Tax base* meningkat, tetapi pajak penghasilan pribadi masih kurang,” katanya.

Kontribusi konkret Bambang dalam pengembangan ekonomi syariah ditandai dengan direalisasikannya pendirian Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2016. Keuangan syariah pun akan diintegrasikan dengan pengembangan sektor riil halal.

Menurut Bambang, dalam membangun ekonomi syariah harus dibarengi dengan praktik ekonomi riil baik berupa penjualan barang maupun penyedia jasa syariah. Apalagi sebut dia, saat ini Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak sehingga peluang menciptakan ekonomi syariah masih sangat besar. Indonesia merupakan negara muslim terbanyak dan ini masih menjadi peluang untuk membangun produsen ekonomi halal. Bila pembangunan ini sudah merata, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi produsen halal global.

“Latar belakang KNKS adalah bahwa Indonesia ingin membuat ekonomi syariah yang terintegrasi. Sebelum ada KNKS, unit syariah sudah ada di BI sebagai bank sentral, OJK juga mengelola sendiri keuangan syariah, MES (Masyarakat Ekonomi Syariah). Nah, dari situ sudah terlihat bahwa potensi ekonomi islam Indonesia sudah ada, namun masih bergerak sendiri-sendiri. KNKS dimulai dari Bapennas dan Menteri Andrinof Chaniago melahirkan Perppes untuk KNKS, tapi belum diaktifkan karena belum efektif dan belum implementatif. Saat itu saya yang masih menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas merealisasikan KNKS

“ Secara koleksi *Tax Amnesty* sudah baik, namun repatriasi masih belum terlalu memuaskan. *Tax base* meningkat, tetapi pajak penghasilan pribadi masih kurang ”



tersebut. KNKS diharapkan bisa melakukan integrasi yang sebelumnya terpisah-pisah,” kata Bambang menjelaskan.

KNKS juga mencanangkan *masterplan* 2019 dengan fokus terhadap pengembangan keuangan dan ekonomi syariah berbasis kolaborasi dan digital. *Masterplan* ini mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi syariah menjadi

lebih kuat. “Harapan saya KNKS bisa menerapkan *masterplan* yang baik dan bisa berdampak kepada kebaikan ekonomi syariah dan ekonomi Indonesia dari mikro ke makro, dan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya,” kata mantan Menteri Keuangan RI, 2014-2016 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, 2016-2019 ini.



Bahlil Lahadalia

Mantan Kondektur yang Menjadi Kepala BKPM

Melata dari strata terbawah, Bahlil Lahadalia membuktikan kapasitasnya sebagai pengusaha berprestasi. Presiden Jokowi pun mempercayainya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namanya Bahlil Lahadiala. Di usia 44 tahun karirnya berpedar terang. Dia memiliki 10 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang di bawah bendera perusahaan *holding*. Pada 23 Oktober 2019 ia diangkat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke-19. Sebelumnya, ia menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2015-2019.

Jika melihat karir dan posisinya sekarang, banyak orang tak percaya Bahlil harus melata benar-benar dari strata paling bawah. Ayahnya kuli bangunan. Ibunya tukang cuci dan penjual kue. Kedua orang tua ini harus membanting tulang untuk menghidupi Bahlil dan tujuh saudaranya. Sejak di bangku SD, anak kedua dari delapan bersaudara ini membantu berjualan kue.

Tapi keterbatasan ekonomi tak membuatnya putus asa mengejar mimpi-mimpinya. "Kesulitan hidup itu justru menjadi tantangan," ujarnya. Asal halal, kerja apa pun ia tak malu melakukannya untuk meringankan beban orang tuanya. Ketika di bangku SMP ia tak ragu menjadi kondektur. Saat di SMEA (kini SMK), ia menjadi sopir angkot paruh waktu. Meski sibuk mencari uang, prestasinya di sekolah tetap cemerlang, bahkan ia pernah menjadi ketua OSIS.

Bahlil sangat mengagumi kedua orang tuanya. Di tengah kesulitan yang menghimpit, mereka tak pernah mengeluh. Hingga akhir hayat kedua orang tuanya tak pernah mengambil hak atau menipu orang. "Bahkan berutang pun tidak pernah," kenangnya.

Sikap dan semangat inilah yang menjadi teladan Bahlil. Kerja keras adalah keseharian yang membawanya berhasil masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua. Semasa kuliah, ia aktif menjadi pengurus Senat Mahasiswa (kini Badan Eksekutif Mahasiswa). Ia juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), bahkan sempat menjadi Bendahara Umum PB HMI. Dari aktivitas berorganisasi inilah ia membangun jejaring dan belajar kepemimpinan.

Selesai kuliah pada 2002, bersama beberapa rekannya Bahlil mendirikan usaha di bidang jasa konsultan keuangan dan Teknologi Informasi (IT). Ia diminta menjabat sebagai Direktur Wilayah di Papua. "Sebenarnya banyak kandidat di posisi tersebut. Tapi karena saya menguasai peta lapangan di sana, saya yang ditunjuk teman-teman di Jakarta untuk menjadi pimpinan cabang di Papua," ujarnya merendah.

Berbekal pengalaman organisasi

dan jaringan luas, setahun berkarir di sana, Bahlil memutuskan keluar dari pekerjaannya. Ia mulai merintis usaha sendiri di luar bidang yang sama. Selama berkiprah di Papua ia melihat potensi kekayaan sumber daya alam Papua yang luar biasa. Bahlil pun mendirikan sejumlah perusahaan yang merambah berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi.

Di dunia usaha pun Bahlil aktif berorganisasi. Pada 2003, ia bergabung menjadi anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Secara bertahap Bahlil menjadi pengurus HIPMI tingkat kabupaten, provinsi, sampai akhirnya HIPMI pusat. Pada 2015, Munas HIPMI memilihnya menjadi Ketua Umum HIPMI untuk periode 2015-2018.

Catatan kinerjanya rupanya menarik perhatian Presiden Joko Widodo yang mengangkatnya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di kabinet Indonesia Maju pada 2019, sepak terjang dan pengalaman Bahlil

dalam memimpin perusahaan hingga organisasi.

Meski sudah menjadi pejabat setingkat menteri, Bahlil tak merasa hebat atau sukses. "Biasa saja. Biarlah orang lain yang menilai," katanya santai. Namun ia punya prinsip hidup yang diyakininya: belajar, belajar, dan belajar serta berkarya. "Harus bekerja hingga meraih hasil. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja itu ibadah," ujar pehobi renang ini.

Sebagai pejabat yang juga pengusaha, Bahlil kenal benar perilaku sebagian pengusaha. "Pengusaha itu suka menggoda untuk mendapatkan jalan pintas meraih sukses," ujarnya sambil tersenyum.

Bahlil sendiri selalu bersikap profesional. "Harus ada komitmen pribadi. Harus bisa membedakan kapan menjadi pengusaha dan kapan menjadi aparat pemerintah," katanya. "Saya harus adil untuk semua, harus menjadi contoh. Memang itu tidak mudah, tapi *InsyaAllah* saya berikhtiar terus," ujarnya.



Biodata:

Nama: Bahlil Lahadalia, S.E.

Tempat Tanggal Lahir: Banda, Maluku Tengah, Maluku, 7 Agustus 1976

Pendidikan:

SDN 1 Seram Timur. Maluku

SMPN 1 Seram Timur. Maluku

SMEA YAPIS Fakfak. Papua

S-1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, Jayapura, Papua

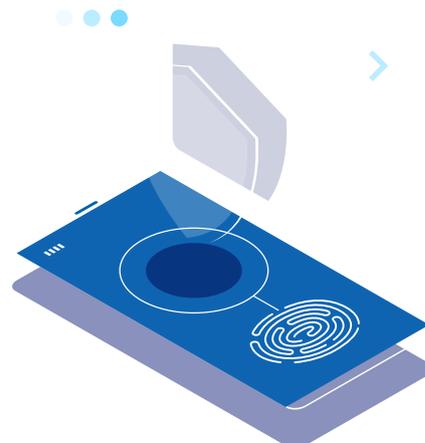
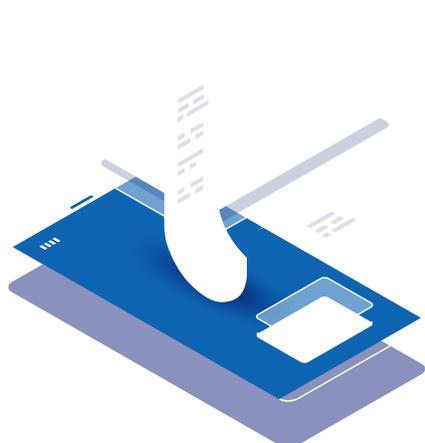
Karier:

2015 – 2019 Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

2019 – sekarang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Mengenal (Kembali) *Digital Banking*

Merebaknya wabah Covid-19 membuat bank mengalihkan sebagian layanannya ke platform digital dan masuk ke era industri 4.0. Apa saja kemudahan yang diberikan dan bagaimana masalah keamanannya?



Digital banking adalah terobosan baru yang memudahkan nasabah mendapatkan layanan bank. Nasabah tidak perlu lagi ke kantor yang terbatas jam operasinya. Melalui *digital banking* transaksi perbankan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja sehingga memberikan kenyamanan lebih dan meningkatkan *user experience*.

Di kutip dari situs OJK layanan perbankan digital adalah layanan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah untuk melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Setelah melakukan registrasi lewat aplikasi atau situs bank yang bersangkutan, nasabah seolah mengantongi ATM pribadi

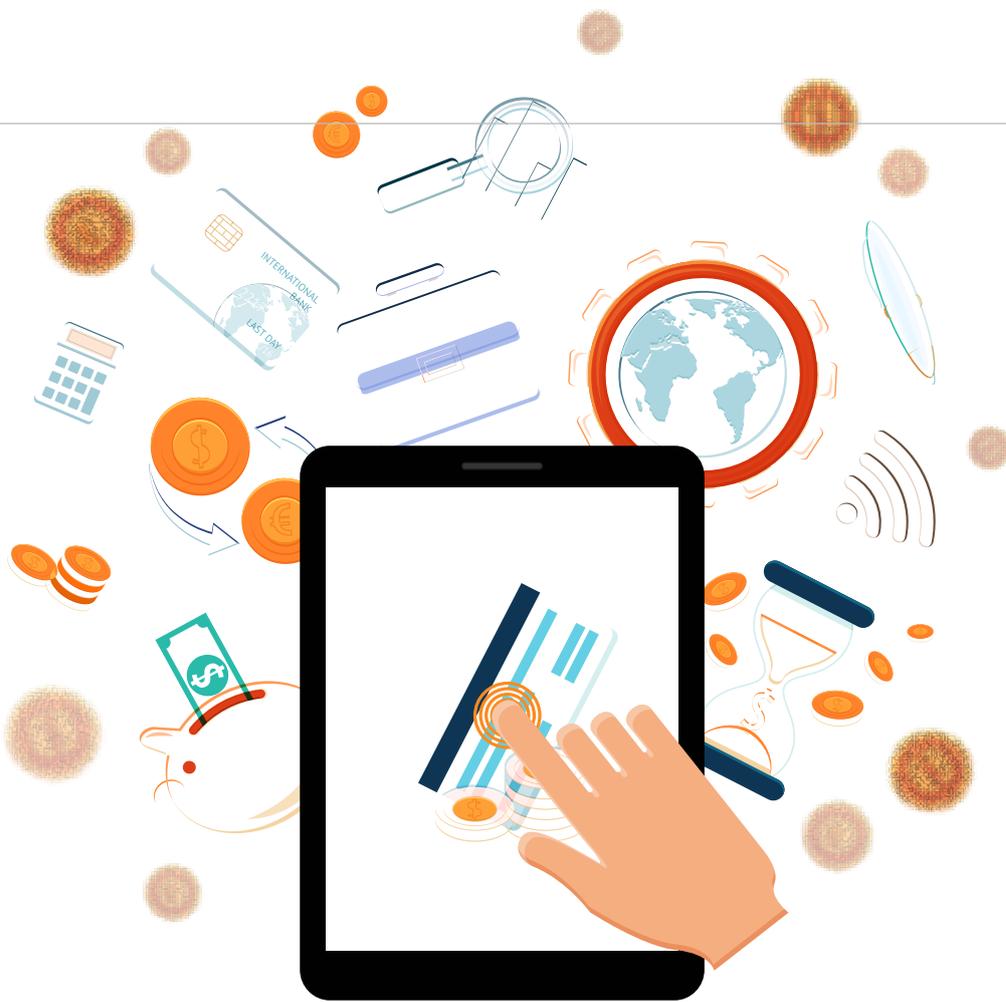
karena *digital banking* menerapkan prinsip *Bank Anywhere*.

Praktis? Tentu. Namun masalahnya, sejumlah nasabah masih meragukan keamanannya. Apalagi, pada awal tahun ini sempat viral pengalaman wartawan senior Ilham Bintang yang dibobol rekening banknya dengan cara *SIM swap fraud* sehingga dana di rekeningnya raib ratusan juta rupiah.

Penerapan transaksi digital memang tidak selamanya aman. Kita perlu memperhatikan aspek manajemen risiko teknologi informasi. Risiko seperti pembobolan rekening bank melalui *sim card* seperti yang terjadi pada Ilham Bintang adalah salah satu risikonya. Risiko lain adalah pembobolan data nasabah akibat pencurian data (*hack*). Untuk itu nasabah harus berhati-hati dalam membuat dan mengamankan *Personal Identification Number (PIN) digital*

bank. Gunakanlah PIN yang tidak mudah ditebak, seperti tanggal lahir, nomor rumah, nama anak, dan sejenisnya. Jangan gunakan PIN yang sama untuk berbagai rekening, karena hal ini memudahkan penjahat membobol semua rekening Anda. Jangan mencatat PIN dan menyimpannya di dompet Anda. Jika dompet Anda tercecer, rekening Anda dapat dengan mudah dibobol. Oleh karena itu, ubahlah PIN Anda secara berkala.

Sampai saat ini pihak bank dan *cyber security* terus memperkuat sistem keamanannya untuk meminimalkan risiko kejahatan. Namun lebih bijak jika nasabah tetap berhati-hati melindungi rekeningnya agar kemudahan dan kenyamanan dapat berjalan seiring dengan keamanan.



OJK Sesuaikan PAYDI di Saat Pandemi

Untuk kemudahan operasi selama masa pandemi, OJK menyesuaikan Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) baik untuk perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah. Meski pemasarannya dilakukan secara daring, namun aspek perlindungan konsumen tidak diabaikan.

Kini pemasaran PAYDI baik untuk perusahaan asuransi konvensional maupun syariah dilakukan secara digital (melalui *video conference*). "Kebijakan ini ditetapkan dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen, pelaksanaannya pun tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan menghindari *moral hazard*," ujar

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo pada Juni 2020.

Anto menambahkan, seluruh proses pemasaran dan penutupan polis asuransi digital harus memenuhi ketentuan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta memenuhi kewajiban perlindungan konsumen di sektor jasa

keuangan dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Ketentuan perundangan yang dimaksud di antaranya mengganti tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, serta risiko produk asuransi yang ditawarkan sesuai ketentuan perundangan ITE.

Selain itu perusahaan asuransi harus memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dan memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, tidak dapat diingkari, data yang disajikan dapat diandalkan, keamanan, pemeliharaan jejak audit, konsistensi, hingga akurasi.

Perusahaan asuransi juga harus memiliki surat pernyataan dari Vendor Teknologi Informasi yang digunakan perusahaan dan direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko yang menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur telah memadai serta *Standard Operating Prochedure (SOP)*.

Sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, ikhtisar polis tetap disampaikan dalam bentuk *hardcopy*. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video serta audio dan memiliki infrastruktur yang mendukung proses otentikasi tanda tangan digital.

Penyesuaian-penyesuaian teknis tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta prinsip perlindungan konsumen yang baik. Penerapan penyesuaian ini bersifat sementara, berlaku sejak 27 Mei 2020 hingga wabah *Covid-19* dinyatakan berakhir oleh pemerintah.

IHSG Menunjukkan Tren Positif tapi Tetap Harus Waspada

Berkat sejumlah kebijakan OJK, memasuki era kenormalan baru, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren positif. Namun investor tetap harus waspada karena ada ancaman munculnya gelombang kedua.

Situasi di pasar modal beberapa waktu terakhir terus menunjukkan tren positif. Hal ini dipengaruhi kebijakan OJK dalam menghadapi situasi Covid-19 yang kini sudah memasuki era kenormalan baru. Di antara kebijakan OJK tersebut adalah memperpendek jam perdagangan dan penerapan *auto rejection* asimetris.

“Bahkan terakhir, IHSG sudah mencapai 4.900. Pencapaian ini karena kami sudah menelurkan berbagai kebijakan, sehingga pelaku pasar merespon positif,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Berdasarkan data dari Direktorat Statistik dan Informasi Pasar Modal terkini, IHSG terus melonjak naik sebesar 5.143,89. Jika menarik kebelakang per Maret 2020, kenaikan IHSG sampai Agustus 2020 mencapai 23,45%.

Sementara itu untuk pasar modal syariah menunjukkan hal yang sama, meningkat per 6 Agustus 2020. Saham meningkat menjadi 3% dibanding akhir tahun 2019 dari 445 menjadi 459 sukuk meningkat 8,3% dari 265 menjadi 283, dan Reksa Dana syariah meningkat 6,42% dari 265 menjadi 282.

Di balik tren positif ini, tentunya ada peran penting dari OJK yang mendukung dengan membuat kebijakan bagi untuk industri pasar modal dengan melakukan digitalisasi di industri pasar modal diantaranya penerapan *e-IPO*, pelaporan XBRL, sentralisasi data *e-KYC*, dan lain-lain.

Namun disamping tren positif yang sedang terjadi pada industri pasar modal, harus tetap hati-hati juga penting. Menurut Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, memasuki masa kenormalan baru diharapkan denyut nadi ekonomi Indonesia bisa kembali berjalan. Meski begitu, Nico menilai tren kenaikan ini tidak akan lama karena angka positif corona di Indonesia masih tinggi dan adanya ancaman penularan Covid-19 gelombang kedua setelah adanya pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Nico percaya ekonomi dan kesehatan bisa saja berjalan beriringan di tengah pandemi jika masyarakat dapat berdisiplin mematuhi protokol kesehatan.



Kinerja OJK Pulihkan Ekonomi Nasional



REFORMASI PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN

DALAM MENDUKUNG STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkelanjutan melakukan reformasi pengawasan sektor jasa keuangan untuk membangun sektor jasa keuangan yang stabil, berkontribusi dan inklusif serta melindungi konsumen. Selama semester I-2020, reformasi pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan melalui implementasi program Strategis OJK 2020 dengan berbagai macam produk, program dan kontribusi yang dihasilkan.

KINERJA OJK SEMESTER I-2020

Pengaturan Sektor Jasa Keuangan

- 40 Peraturan OJK (POJK)
- 9 Surat Edaran OJK (SEOJK)

Supervisory Action Sektor Jasa Keuangan

- Perbankan**
 - 2 izin usaha BPR
 - Penyelesaian rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan pengawasan Bank
 - Penilaian Kematangan dan Kapasitas IFT New Entry pada 217 OJK dan 177 Lulus
- Pasar Modal**
 - 184 Peringatan Tertunda
 - 192 Denda
 - Pembekuan 2 izin WPPE
 - Penutupan izin usaha 7 OPS dan PEE serta 6 WPPE
- Industri Keuangan Non Bank**
 - 39 sanksi peringatan
 - 30 sanksi pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
 - 278 sanksi administratif PP dan PMW
 - 6 izin usaha

Pertuisan Akses Keuangan

- Program One Student One Account rekening 32.064.229
- 17 wilayah Persepsi/Kota
- 16,3 triliun
- Pendirian 5 BUMDesa Center di Kabupaten OKG Timur

Pelindungan Konsumen

- Penghentian usaha legal bersama SWI
- 61 Investasi legal
- 589 pinjaman online legal
- 25 usaha patal legal
- Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
- 13 Sprindik
- 12 Pulihpahan Berkas Kejaksam
- 10 Berkas Perkara Lampap (P-21)

Penguatan Ekonomi Keuangan Syariah

- Pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) di Rembang, Palembang dan Lombok, Desember 2020
- 56 bank
- 44,49 miliar
- 32.223 nasabah
- Meluncurkan asuransi syariah perjalanan Sehat anshur bersama Kementerian Agama

Pengawasan Berbasis Teknologi

- Aplikasi Pelaporan Transaksi Ciri Terintegrasi (SPETRO)
- Sistem Informasi Risk Based Supervision (SIRBAS)
- Aplikasi Portal Pertindungan Konsumen (SAPPA)

Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan

- E-Signatur pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)
- E-Registration akasi korporasi Penambahan Modal dengan HMETD
- E-Wiring RUPS secara Elektronik
- Aplikasi Database APYKAP Terintegrasi

DUKUNGAN PADA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit & Pembiayaan

Perbankan

- Total Debitur: 6,56 Juta Debitur
- 740,79 Triliun

Perusahaan Pembiayaan

- UMKM: 5,29 juta Debitur
- 317,29 Triliun

Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PMK 64 - Penempatan Dana pada Bank Peserta dan PMK 65 - Subsidi Bunga)

- SDB OJK dan Kementerian Keuangan Terkait PMK 64/2020 dan PMK 65/2020
- Penyampaian informasi Calon bank peserta kepada Kementerian Keuangan
- Calon debitur penerima subsidi bunga kepada Kementerian Keuangan

KINERJA INTERMEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN

Perbankan

- Kredit Perbankan: Mei 5.912,84T, Apr 5.489,98T, Rp5.583,25T (3,8% YoY)
- Dana Pihak Ketiga: Mei 4.214,31T, Apr 4.128,01T, Rp4.174,48T (3,8% YoY)

Pasar Modal

- NAB Revisa Dana: Mei 4,7T, Apr 4,7T, Rp4,7T
- Emiten Baru: Mei 22, Apr 22, 22

JKMD

- Piutang Pembiayaan: Mei 451,80T, Apr 444,98T, Rp425,82T (-1,1% YoY)
- Investasi Dana Pensiun: Mei 249,78T, Apr 271,48T, Rp274,80T (1,4% YoY)

Pertumbuhan Kredit Perbankan

- Berdasarkan Jenis: Kredit Modal Kerja (1,43%), Kredit Perumahan (2,25%), Kredit Investasi (6,75%)
- Berdasarkan Sektor: Perdagangan (8,23%), Pertambangan (5,41%), Kesehatan (5,25%), Pertanian (3,77%)

Risiko Kredit

- 3,01% NPL Gross Perbankan
- 3,99% NPL Gross Per Usaha Perbankan

Risiko Likuiditas

- 123,2% ALCOB
- 26,2% ALCOB

Permodalan Sektor Jasa Keuangan

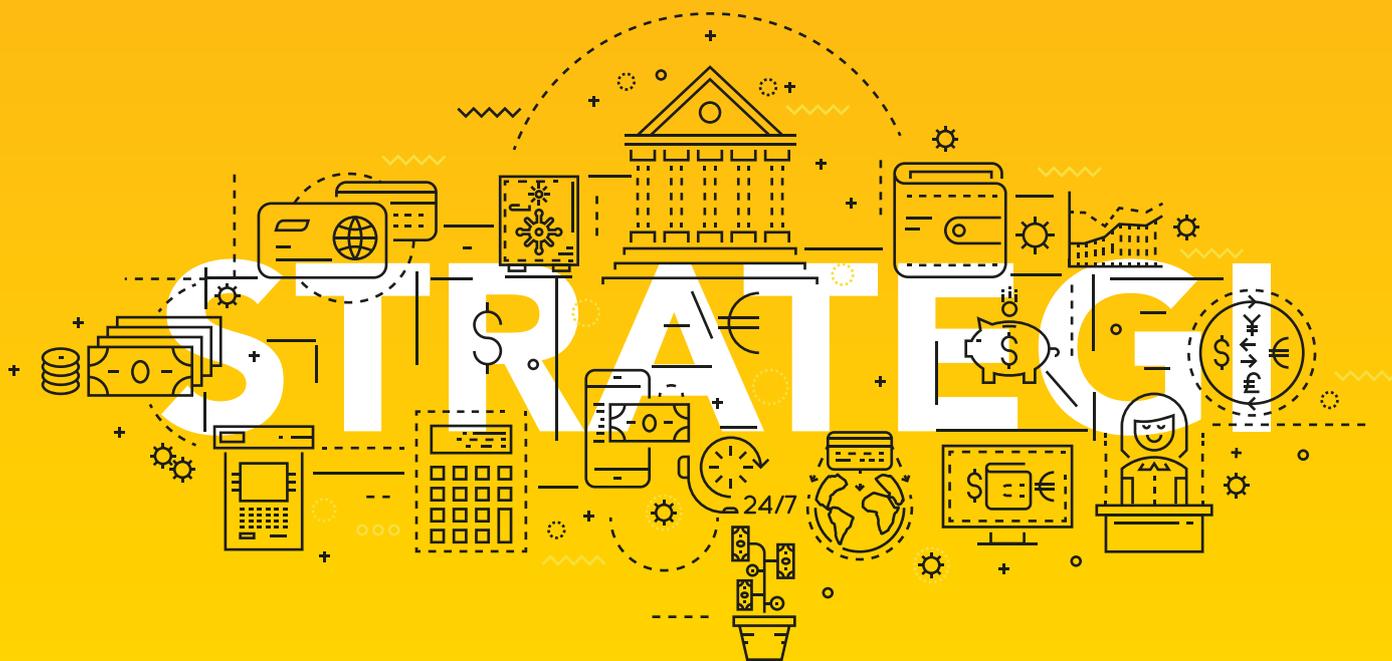
- UkP Perbankan: Mei 22,19%, Apr 22,14%
- UkP Asuransi: Mei 2,7, Apr 2,7
- UkP Dana Pensiun: Mei 2,41, Apr 2,41
- UkP Jasa Keuangan: Mei 4,87%, Apr 4,87%

OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga pemerintah bergerak cepat memulihkan perekonomian nasional. Berikut laporan OJK di semester I-2020 dalam menjalankan fungsinya sebagai pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.

OJK secara berkelanjutan melakukan reformasi pengawasan sektor jasa keuangan untuk membangun sektor jasa keuangan yang stabil, berkontribusi dan inklusif serta melindungi konsumen. Selama semester I-2020, reformasi pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan melalui implementasi program Strategis OJK 2020 dengan berbagai macam produk, program, dan kontribusi yang dihasilkan.

Kinerja di semester I-2020 (Januari-Juni) menunjukkan fungsi OJK sebagai pengatur jasa keuangan telah menerbitkan 40 Peraturan OJK (POJK) dan 9 Surat Edaran OJK (SEOJK). Sementara itu, fungsi pengawasan di 3 sektor yakni perbankan, pasar modal, dan IKNB, memperlihatkan ketegasan OJK dalam menegakkan ketertiban lembaga keuangan dengan mencabut 21 izin usaha. Pada sektor perbankan 2 izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah dicabut. Sementara di sektor pasar modal ada 7 izin usaha Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 6 izin usaha Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang dinonaktifkan. Untuk sektor IKNB terdapat 6 izin usaha dari berbagai lembaga keuangan yang dicabut OJK.

Selain menjalankan fungsinya sebagai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan OJK juga mendukung penuh setiap kebijakan dan program pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional yang porak poranda akibat pandemi Covid-19.



5 Strategi OJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK terus mengupayakan berbagai solusi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, termasuk menggandeng *public figure*.

Literasi dan inklusi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan OJK. Hal ini dipicu dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2013 yang diselenggarakan oleh OJK menunjukkan bahwa masyarakat cenderung masih kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan keuangan.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih harus terus ditingkatkan, meskipun terjadi

peningkatan dari tahun 2016 ke 2019. Pada 2016, tingkat literasi keuangan adalah sebesar 29,7% naik menjadi 38,03% pada 2019. Sementara itu tingkat inklusi keuangan, dari 67,8% pada 2016 naik menjadi 76,19% pada 2019.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, Kristianti Puji Rahayu memaparkan secara virtual pada Rabu (19/8) mengenai tantangan OJK dalam meningkatkan persentase literasi dan inklusi keuangan.

"Ada tantangan demografi mulai dari bahasa, agama, budaya suku, agama, hingga tingkat ekonomi dan pendidikan masing-masing wilayah di Indonesia," ujarnya. Selain itu, dari segi geografis juga perlu diperhatikan strateginya. Hal ini dikarenakan negara Indonesia berbentuk kepulauan, dan ada wilayah yang tidak dapat langsung terjangkau dan menghambat proses edukasi.

Di tahun 2019, OJK mencatat ada 21 provinsi yang memiliki literasi keuangan lebih rendah di bawah indeks nasional. Sementara, inklusi keuangan yang masih berada di bawah indeks nasional terdapat di 19 provinsi. Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019 yang dilakukan OJK, telah terjadi kenaikan

indeks pada inklusi maupun literasi keuangan.

Maka dari itu, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tahun ini dan tahun depan, OJK sudah mengupayakan 5 strategi khusus. *Pertama*, mengembangkan siklus perencanaan literasi dan edukasi. Mengingat tahun ini Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19, sehingga perencanaan edukasi dan literasi akan diatur mengikuti situasi di tiap-tiap daerah.

Kedua, mengembangkan edukasi digital. Dalam penyelenggaraan edukasi digital, saat ini OJK sudah mengoptimalkan kanal yang tersedia agar proses edukasi dan sosialisasi tersebut berjalan lancar. Salah satunya dengan memanfaatkan platform virtual. Kepala Departemen Literasi dan

di mal atau tempat-tempat ramai, ada juga edukasi ke beberapa komunitas. Namun dengan adanya pandemi, kegiatan ini tidak bisa dilakukan. Jadi edukasi secara virtual menjadi salah satu solusinya,” ungkap Kristrianti. Perubahan tersebut memang tidak mudah, dibutuhkan *switching* dari satu metode ke metode lain.

Ketiga, memperkuat edukasi dan literasi keuangan syariah yang terintegrasi dan edukasi berbasis komunitas keagamaan, seperti menyusun materi khutbah dalam kegiatan keagamaan dengan menyelipkan muatan edukasi keuangan. Hal ini bisa melibatkan guru di pesantren dalam proses sosialisasi hingga melakukan *workshop* secara masif bersama industri jasa keuangan (IJK) syariah.

SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Buku tersebut dilengkapi dengan pengetahuan atau dinamika yang ada di dalam sektor jasa keuangan seperti bimbingan teknis, inovasi-inovasi digital, dan lain sebagainya. Selain itu juga sudah digalakkan edukasi ‘One Branch One Activity’ dan ‘10 km care’.

Kelima, terus memperkuat strategis dengan berbagai *stakeholder* dan masyarakat untuk edukasi yang lebih masif, seperti universitas dan aliansi strategis dengan kementerian/lembaga terkait. “Seperti dengan pemerintah kita bisa melibatkan mahasiswa fakultas ekonomi yang akan melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di daerah terpencil agar bisa mensosialisasikan edukasi keuangan. Juga optimalisasi peran dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas akses informasi demi menggenjot literasi dan edukasi keuangan di daerah,” tambah Kristrianti.

Salah satu upaya OJK yang lain adalah dengan menggandeng beberapa *influencer* hingga *youtuber* dalam menyebarkan edukasi tentang literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat Indonesia melalui media sosial. Menurut Kristrianti, sosialisasi dengan pendekatan melalui media sosial terbilang efektif di era pandemi sekarang ini. Karena masyarakat saat ini lebih bisa memahami informasi yang dikemas secara menarik melalui berbagai media sosial terlebih para *Influencer* akan selalu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh kalangan milenial.

“Selain *influencer* yang dikenal secara nasional seperti Mak Beti, kami juga menggandeng *influencer* daerah seperti Mbah Minto (YouTuber asal Klaten), Yai Najib (*influencer* asal Palembang) yang langsung menyasar masyarakat daerah melalui bahasa percakapan daerahnya. Hal ini bisa menciptakan kesan tersendiri bagi masyarakat daerah tersebut,” kata Kristrianti menerangkan.



Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu menyatakan, edukasi virtual ini dijalankan tetap menuju sasaran yang telah ditentukan.

“Sebelumnya kami lebih banyak *face to face*, dengan membuka *stand*

Keempat, memperkuat infrastruktur edukasi revisi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) ke versi baru tahun 2020. Saat ini sudah disusun buku literasi tingkat PAUD, dan memperbaharui buku literasi tingkat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II/2020 Mulai Stabil

Sempat mendapat keraguan dalam menghadapi kuartal II/2020 yang akan diprediksi mengalami kontraksi lebih dalam dari sebelumnya. Namun hal tersebut ditepis dengan kinerja OJK dan industri jasa keuangan karena sampai memasuki akhir kuartal II/2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil.



Diawali dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini. Menurutnya, PDB akan tumbuh berkisar -3,5% hingga -5,1%, dengan titik tengah -3,8%.

Selain itu peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 minus 3,7% secara (yoy), namun bisa terkontraksi -4% hingga -6%.

Menurutnya, anjloknya pertumbuhan ini karena pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lemah di kuartal II/2020. "Kita bisa lihat dari tekanan inflasi yang rendah selama Ramadhan dan penjualan ritel yang terus turun," katanya.

Namun nyatanya tidak seperti yang diperkirakan, karena OJK yang bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan per tanggal 27 Agustus 2020, bahwa sektor jasa keuangan dalam kondisi stabil dan terjaga, namun tetap dalam kewaspadaan mengantisipasi tekanan perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Tidak hanya stabil melainkan beberapa sektor seperti pasar modal, dan industri keuangan bank dan non-bank

juga mengalami kemajuan. Di mulai dari pasar saham tanggal 26 Agustus ditutup menguat di level 5.340,33. Sejak 8 Juli 2020, IHSG konsisten di atas level 5.000. Di bulan Juli kinerja IHSG naik 4,98% *mtm*, dan sampai dengan 26 Agustus naik 3,70% *mtd*.

Upaya digitalisasi pada sektor jasa keuangan merupakan kunci kestabilan perekonomian Indonesia selama kuartal II/2020. Seperti melakukan pengawasan berbasis teknologi melalui berbagai aplikasi yang telah dibangun OJK, termasuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen.

Selain itu restrukturisasi kredit memiliki peran sangat besar dalam menekan tingkat NPL dan meningkatkan permodalan Bank sehingga stabilitas Sektor Jasa Keuangan dapat terjaga dengan baik. Sejak diluncurkan 16 Maret 2020 hingga 10 Agustus, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai nilai Rp837,64 triliun dari 7,18 juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang mencapai Rp353,17 triliun berasal dari 5,73 juta debitur. Sedangkan untuk non-UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp484,47 triliun dengan jumlah debitur 1,44 juta.

Apa yang Didahulukan di Tengah Pandemi, Dana Darurat atau Investasi?

Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja perekonomian berimbas pada kondisi keuangan masyarakat. Di tengah mengetatnya pendapatan kita perlu piawai mengelola keuangan pribadi di tengah pandemi.

Terganggunya aktivitas perekonomian akibat imbas pandemi telah menurunkan pendapatan sebagian besar masyarakat, sementara jumlah pengeluaran relatif tidak berkurang – bahkan bertambah karena biaya listrik yang rata-rata naik karena meningkatnya aktivitas di rumah. Dalam situasi demikian, apa yang harus dilakukan agar dapat bertahan?

Pakar perencanaan keuangan Ligwina Hananto mengatakan kondisi demikian bisa teratasi bila masyarakat sadar akan pentingnya pengaturan keuangan pribadi saat terjadi pandemi seperti saat ini. “Agar pengeluaran harian terkendali, sekaligus tetap bisa menabung dan berinvestasi, semua harus diperhitungkan dengan ilmu keuangan, bukan dengan

perasaan,” ujarnya. “Jangan berasumsi pengeluaran bulanan sama saja karena kondisinya berbeda,” lanjutnya.

Ligwina menyarankan perlunya mencatat setiap pengeluaran mulai dari pos yang besar hingga pos-pos kecil. Misalnya, pos pengeluaran untuk gaya hidup dan kehidupan sosial bisa diturunkan atau bahkan ditiadakan sementara waktu. “Prioritaskan pada kebutuhan utama, yakni cicilan dan pengeluaran rutin,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan tabungan dan investasi, masihkah pos tersebut diisi pada saat pemasukan juga tidak pasti? Ligwina menjelaskan, masyarakat bisa menabung sekaligus berinvestasi di waktu yang sama. Caranya, dengan menyisihkan sedikit pemasukan untuk investasi dan nominal yang lebih besar untuk menabung.

“Anggarkan sejumlah kecil untuk jangka waktu yang panjang untuk investasi dan alokasikan dana darurat atau tabungan dalam jumlah yang lebih besar,” ujar Ligwina. Dana darurat ini penting untuk berjaga-jaga jika sakit, misalnya. Sedangkan untuk instrumen investasi pilih yang berisiko rendah, agar tidak terlalu berdarah-darah jika terjadi hal yang tidak diinginkan.



Tetap Bertahan di Kala Pandemi, UMKM Perlu Digitalisasi



Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memaksa masyarakat segera beradaptasi dengan kondisi *new normal*. Kini, aktivitas digital menjadi keseharian masyarakat terutama kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seiring pemberlakuan *social distancing*, sebagai upaya memutus rantai penularan wabah tersebut.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menegaskan digitalisasi UMKM merupakan sebuah keharusan. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan target digitalisasi sebanyak 10 juta UMKM di tahun 2020. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), hingga saat ini baru 8 juta UMKM yang telah terdigitalisasi.

Pakar *Digital Marketing*, Adreas Agung Bawono, juga berpendapat, perilaku konsumen yang serba *online* melalui berbagai fasilitas media sosial dalam memenuhi kebutuhannya perlu cepat diadaptasi oleh pelaku UMKM dengan melakukan digitalisasi bisnis. Ketika butuh sesuatu barang, kini setiap orang cukup membuka *smart phone*, lalu *browsing* di Google, Instagram, Facebook atau Youtube. Nah, ketika produk dan

layanan UMKM tak tersedia pada fasilitas media sosial tersebut, maka sudah pasti akan tertinggal. Jika UMKM ingin *survive* di *new normal*, maka mereka harus mampu memberi suguhan layanan *online* pada pembelinya.

Di awal, UMKM dapat melakukan digitalisasi dengan turut menggandeng perbankan. Sinergi dengan perbankan menjadi pilihan alternatif UMKM untuk menerapkan digitalisasi secara bertahap dan berkelanjutan. Terkait digitalisasi UMKM sendiri, perbankan dapat memberikan tiga solusi secara komprehensif, yaitu melalui *digital banking* untuk *tools* transaksi, *marketing online* untuk solusi jualan produk, dan pemberian *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi UMKM.

Pertama yakni layanan *digital banking*. Ini adalah layanan atau kegiatan perbankan

dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik bank, dan atau melalui media digital milik calon nasabah dan atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Implementasi *digital banking* sendiri akan mengintegrasikan layanan perbankan elektronik seperti ATM, EDC, *internet banking*, *mobile banking*, SMS *banking*, *phone banking*, dan *video banking* untuk mempermudah layanan pada masyarakat luas.

Kedua, *marketing online* solusi untuk jualan produk UMKM. Perbankan dapat membantu penjualan produk dan jasa UMKM dengan membuat portal UMKM *online*. Perlu diketahui, imbauan pemerintah agar masyarakat melakukan jaga jarak dan tidak berkerumun mempengaruhi penjualan pelaku UMKM. Menyasiasi hal tersebut,

perbankan dapat membantu pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistemnya sehingga mampu berjalan secara *online*.

UMKM dapat terbantu penjualan produk dan jasanya secara *online*, baik melalui *marketing area* lokal, nasional maupun global. Tidak hanya berhenti disitu, perbankan dapat juga memberikan fasilitas *platform digital* UMKM. Pelaku UMKM yang berminat cukup masuk di *website* bank melalui proses tahapan dengan mudah dan *user friendly*. Nasabah diwajibkan melengkapi data dan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu dengan mengakses *microsite* di *website* bank terkait.

Secara teknis, pihak penjual akan diminta untuk menyiapkan dokumentasi produk, mengirimkan

sampel barang, hingga proses pengiriman barang ke gudang-gudang inventori yang dikelola pihak portal UMKM. Barang tersebut selanjutnya akan dibantu penjualannya ke objek pemasaran yang lebih luas, karena terhubung dengan *e-commerce* terkemuka. Produk unggulan UMKM dapat langsung dibeli di *e-commerce*.

Ketiga, program CSR perbankan berupa Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk UMKM. Program CSR berupa PKBL perbankan ini bertujuan membantu pelaku UMKM mendapat pelatihan serta pendampingan terkait penggunaan teknologi secara optimal, sehingga mereka melek teknologi serta terbiasa dalam penggunaannya. Bisa juga, CSR dipergunakan untuk membuat sistem dan pembelian teknologi sederhana dalam membantu UMKM mengembangkan usahanya. Diharapkan, dengan pemahaman dan kemampuan penggunaan teknologi, UMKM dapat segera memulai proses digitalisasinya sehingga usahanya dapat berkembang.

Perlu diketahui, menjalankan bisnis secara daring memiliki beberapa manfaat. Di antaranya pelaku UMKM dapat menghemat biaya operasional karena tidak perlu menyewa toko fisik. Tak hanya itu, mereka tidak perlu menentukan lokasi yang strategis agar produk dapat menjangkau konsumen. Sebab, situs bisnis daring dapat diakses di mana pun dan kapan pun melalui koneksi internet

Dengan langkah taktis ini, harapannya perbankan dapat membantu UMKM melalui digitalisasi sehingga mereka akan siap bersaing di tengah era *new normal*. Ketika UMKM sudah dapat eksis dan kuat di era *new normal*, diharapkan UMKM dapat tampil menjadi penyelamat serta penyangga ekonomi nasional di tengah krisis akibat Covid-19.



Aman Bersepeda di Tengah Pandemi

Bersepeda menjadi tren positif di tengah pandemi. Selain menyehatkan, bersepeda juga mengurangi rasa bosan aktivitas di rumah saja akibat pandemi. Namun, bersepeda harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya!

Bila Anda ke luar rumah ketika pagi atau malam hari, terutama saat akhir pekan, pasti banyak sekali yang bersepeda di jalan raya. Berbagai jenis sepeda, seperti sepeda lipat pun kini laris manis di pasaran. Bahkan, ada pula yang memilih sepeda untuk menggantikan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dan mobil sebagai alat transportasi ke berbagai tempat.

Selain itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dicanangkan pemerintah menjadi alasan yang kuat mengapa tren bersepeda melejit ketika pandemi. Banyak orang memilih bersepeda untuk mengusir rasa jenuh di rumah dibandingkan mengunjungi mal atau pusat kerumunan. Selain itu, masyarakat juga memilih bersepeda karena dianggap aman, ramah lingkungan dan

terjangkau. Hal ini karena dengan bersepeda mereka bisa mendapatkan udara segar dan bersih.

Pada hakikatnya, bersepeda pasti mempunyai tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh. Agar niat itu tercapai dengan baik, maka bersepeda di tengah pandemi seperti sekarang wajib hukumnya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah, sebab di luar sana, Covid-19 masih diam-diam menginfeksi. Alih-alih ingin sehat, bila tidak mengikuti protokol kesehatan malah pulang membawa virus.

Untuk itu, berikut tips aman bersepeda saat pandemi Covid-19:

1. Tetap Gunakan Masker saat Bersepeda

Kendati bersepeda menggunakan masker itu mengurangi udara yang masuk ke paru-paru, pesepeda tetap wajib memakai masker. Oleh karena itu, pesepeda harus mengukur kemampuan tubuh dan jika saat bersepeda sudah terasa berat, intensitasnya harus diturunkan.

Bersepeda dengan menggunakan masker tentunya berat. Oleh karena itu, bersepeda hanya untuk bersenang-senang saja.

2. Gunakan Helm dan Pakaian Tertutup

Bersepeda juga memiliki risiko jika terjatuh. Oleh karena itu, pesepeda harus melengkapi diri dengan alat pelindung.

3. Tetap Terapkan Jaga Jarak Antar Pesepeda

Pembatasan jarak juga berlaku saat bersepeda. Pemberian jarak bukan hanya dengan rombongan, namun juga saat berpapasan.

4. Cukup Buat Satu Barisan

Bersepeda artinya juga harus menjaga keselamatan saat berkendara. Idealnya, pesepeda harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Antar pesepeda harus berjarak antara satu hingga dua meter dan tidak membuat dua baris.

5. Selalu Bawa *Handsanitizer* saat Bersepeda

Salah satu barang yang tidak boleh ditinggalkan yakni *handsanitizer*. Sebab, saat bersepeda belum tentu bisa menemukan fasilitas untuk cuci tangan.

6. Bawa Air Minum Sendiri

Siapkan air minum dari rumah. Selain itu, jika memungkinkan pesepeda tidak berhenti di warung karena berisiko Covid-19.

7. Pilih Jalan yang Sepi

Pemilihan rute saat bersepeda juga harus diperhatikan. Pesepeda hendaknya memilih jalan yang sepi sehingga meminimalisir pertemuan dengan banyak orang.



AYO KITA MENABUNG!

MENABUNG SEJAK DINI, MELATIH DISIPLIN DIRI



Aku **Pelajar**, Aku Generasi **SimPel**